

## DAFTAR PUSTAKA

- Achdian Anggreny Bangsawan, A. A. (2021). Efek Pelanggaran Star Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21. No. 2, 2021, 461-472.
- Aen Fariah & Ikhsan Nendi (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Cirebon Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Vol 2, No.2, Juli 2020
- Azhar dan Khaliful (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021*.
- BPK-RI, 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2020*
- BPK-RI, 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2019*
- BPK-RI, 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2018*
- BPK-RI, 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2017*
- BPK-RI, 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2016*
- Ghozali, I. 2021, *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jensen, M, C, dan W. Meckling. (1976). Theori of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of finance economic* 3:305-360

- Kusumawati, D., dan Ratmono, D. (2017). Determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 1, 1-15.
- Luthfina, H & Marita, K.W. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Surakarta.
- Mimelientesa Irman & Suryati. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014. E-ISSN 2527-8215
- Nurdiono. (2014). Analisis hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Rafrini Amyulianty, A. S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, Vol.1. No. 1 14-27.
- Ratmono, D. K. (2017). Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. 1-15.
- Santi Ananda Putri, W. R.(2018). Pengaruh Temuan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Audit Kepatuhan BPK Pada Pemerintah Daerah Tahun Iik 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 5 No. 2 90.

Suryati, M. I. (2019). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, Vol.2 No. 2 197.

Safitri, N.L.K.S.A., dan Darsono. (2015). Pengaruh sistem pengendalian internal dan temuan kepatuhan terhadap opini audit pada pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 5, No. 1, 1-12

Samsul Rosadi et, al., (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 02, 2017.

Siaran Pers BPK RI. (2021). *Capaian Opini WTP Lebih Target Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja*. [https://www.bpk.go.id/news/bpk-capaian-opini-wtp-lebih-target-reformasi-sistem-akuntabilitas-kinerja/Diakses pada 10 Februari 2022](https://www.bpk.go.id/news/bpk-capaian-opini-wtp-lebih-target-reformasi-sistem-akuntabilitas-kinerja/Diakses%20pada%2010%20Februari%202022)

Siaran Pers BPK RI. (2021). *Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA Alami Peningkatan*. [https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan /Diakses pada 10 Februari 2022](https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan/Diakses%20pada%2010%20Februari%202022)

Siaran Pers BPK Sumsel. (2021). *Kabupaten PALI mendapat Opini WDP atas LKPD Tahun 2020*. <https://sumsel.bpk.go.id/?p=30323#:~:text=Hasil%20pemeriksaan%20atas%20Laporan%20Keuangan,16%2F4%2F2021>).

Sugiyono. 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R& D*. Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.